

Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham terhadap Tax Aggressiveness di Indonesia

The Influences of Ownership Structures Towards Tax Aggressiveness in Indonesia

Agita Zafi Rahmasari dan Agung Nur Probohudono

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret
zafiagita@gmail.com, anprobohudono@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

The main aim of this research is to examine the influences of ownership structures towards the companies' tax aggressiveness. The samples used in this research consist of the companies listed in the Indonesia Stock Exchange in 2015-2016. Furthermore, the data used in this research is secondary data obtained from the companies' financial reports and annual reports. This research is a quantitative research and the method of analysing the data is regression analysis. The tax aggressiveness was measured with Book Tax Differences (BTD) proxy. The result shows institutional ownership give no significant effect towards tax aggressiveness, while government ownership and foreign ownership give negative significant effects towards tax aggressiveness. The limitation of this research is the using of 2-year samples only that consist of companies in various sectors.

Keyword: *tax aggressiveness, ownership structures, book tax difference*

PENDAHULUAN

Pajak dianggap sebagai sumber penerimaan terbesar bagi negara terutama di Indonesia. Warga negara sebagai wajib pajak diharuskan membayar pajak yang berguna bagi pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur negara untuk kepentingan masyarakat luas (Gompers dan Metrick, 2001). Oleh karena itu, kepatuhan warga negara dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku dinilai sangat penting. Berdasarkan data mengenai laporan kinerja yang dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, persentase penerimaan pajak negara mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai 2016 secara terus menerus. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak wajib pajak pribadi maupun badan belum melakukan memenuhi kewajiban membayar pajak secara maksimal.

Begitu pula dalam dunia bisnis, perusahaan merupakan wajib pajak yang harus menyetorkan pajak atas laba yang didapatkan sesuai dengan tata peraturan perpajakan yang berlaku. Dikarenakan tidak mendapat imbal jasa secara langsung, sebagian wajib pajak menganggap pajak sebagai beban. Di samping itu, pajak juga mengurangi jumlah laba yang didapatkan perusahaan sehingga ada anggapan keuntungan yang didapat perusahaan tidak tercapai secara maksimal. Tidak sedikit wajib pajak yang berusaha mencari strategi untuk mengurangi tanggungan pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Para pemegang saham cenderung meminimalisir pembayaran pajak atau melakukan tindakan pajak agresif agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan (Hanlon dan Slemrod, 2009).

Agresivitas pajak dalam perusahaan bukanlah suatu kebijakan yang diterapkan semua perusahaan, namun mempertimbangkan timbulnya biaya dan manfaat yang

menyertainya. Perilaku ini dapat menimbulkan biaya dan manfaat yang cukup signifikan baik kepada manajer, pemegang saham, maupun masyarakat luas (Lanis dan Richardson, 2011). Dengan demikian, manajer perusahaan harus mempertimbangan keuntungan dan dampak apabila perilaku tersebut dilakukan perusahaan. Tindakan agresivitas pajak dapat menimbulkan adanya *agency problems* akibat perbedaan kepentingan manajer dan pemegang saham yang tidak sesuai dengan resiko pajak yang ditimbulkan (Wahab, Ariff, et al., 2017).

Tindakan pajak agresif dalam perusahaan dapat timbul karena adanya berbagai macam faktor yang mempengaruhinya. Telah dibahas dalam beberapa penelitian terdahulu faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan perilaku agresivitas pajak. Penelitian ini akan menghubungkan struktur kepemilikan saham sebagai faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak dalam perusahaan. Hal ini dilatarbelakangi tingginya jumlah pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan pemegang saham menimbulkan keinginan bagi pemegang saham untuk menginginkan perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak (Chen, Chen, et al., 2010). Struktur kepemilikan saham yang akan dipaparkan dalam penelitian ini adalah kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengaitkan hubungan struktur kepemilikan saham sebagai faktor yang dapat mempengaruhi adanya agresivitas pajak di perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan di China (Zeng, 2010; Chan, Mo, et al., 2013) menyimpulkan hasil bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah memiliki agresivitas pajak lebih rendah daripada perusahaan yang tidak terdapat kepemilikan pemerintah. Penelitian Ying, Wright, et al. (2017) menyebutkan bahwa kepemilikan pemerintah dan institusional memberikan pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian Khurana dan Moser (2009) serta penelitian Khan et al., (2016) juga mendukung hasil penelitian tersebut dengan menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian Annuar, Salihu, et al. (2014) membuktikan bahwa kepentingan investor asing memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak perusahaan.

Ide penelitian muncul berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Hairul Azlan Annuar, Ibrahim Aramide Salihu, Siti Normala Sheikh Obid yang berjudul "*Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects*" pada tahun 2014 di negara Malaysia. Penelitian tersebut membahas mengenai hubungan struktur kepemilikan saham dan tata kelola terhadap penghindaran pajak. Struktur kepemilikan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah struktur kepemilikan saham yang dibahas adalah kepemilikan pemerintah, asing dan institusional. Kepemilikan instusional sangat melekat pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dimana hampir setiap perusahaan terdapat saham yang dimiliki institusi, sehingga penulis ingin menambahkan kepemilikan tersebut ke dalam penelitian. Pengukuran penghindaran pajak perusahaan pada umumnya sering menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR), namun penelitian ini menggunakan proksi *Book Tax Difference* untuk mengukur *tax aggressiveness* yang belum banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Berdasarkan atas pemaparan latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan membahas hubungan dari kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional terhadap *tax aggressiveness* di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan memiliki pandangan bahwa di dalam perusahaan terdapat dua pihak yaitu manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Hubungan keagenan adalah kontrak yang melibatkan prinsipal dan agen untuk melakukan kegiatan-kegiatan atas kepentingan prinsipal dimana melibatkan adanya pedelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan terhadap agen (Jensen dan Meckling, 1976). Ketika dalam menjalankan kegiatan perusahaan agen mengutamakan kepentingan sendiri dan mengesampingkan tujuan perusahaan, maka timbulah masalah keagenan (*agency problems*).

Teori keagenan menjelaskan mengenai konflik keagenan dapat timbul akibat perbedaan kepentingan yang terjadi antara manajer dengan beragam pemegang saham di perusahaan (Linder dan Foss, (2015). Manajemen dalam menjalankan perusahaan mungkin mempunyai kepentingan yang berbeda dari pemegang saham sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Perusahaan juga menanggung *agency cost* yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengurangi adanya masalah keagenan. Manajer perlu untuk diberikan insentif yang cukup agar dapat membatasi penyimpangan manajer. Teori keagenan pada penelitian ini akan menjelaskan timbulnya masalah keagenan antara manajemen dengan para pemegang saham dalam pembayaran pajak perusahaan. Perilaku pembayaran pajak perusahaan akan dinilai berdasarkan struktur pemegang saham yang berbeda-beda.

Tax Aggressiveness

Banyak anggapan bahwa bagi perusahaan pajak merupakan beban yang bernilai cukup besar. Beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dapat mempengaruhi laba sehingga banyak perusahaan melakukan strategi perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan pada negara. *Tax aggressiveness* atau agresivitas pajak meliputi segala aktivitas perencanaan pajak baik secara legal, ilegal ataupun ditengah-tengahnya agar jumlah pajak yang dibayarkan berkurang dari yang seharusnya (Laguir, Staglianò et al. 2015). Strategi untuk menurunkan besaran laba kena pajak perusahaan dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Frank, Lynch et al., (2009). *Tax avoidance* mengurangi pembayaran pajak secara legal dengan mencari celah atau memainkan aturan perpajakan, sedangkan *tax evasion* adalah strategi mengurangi pembayaran pajak secara ilegal yang melanggar hukum dan aturan perpajakan yang berlaku.

Agresivitas pajak pada perusahaan dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian bagi manajer, pemegang saham, maupun masyarakat. Keuntungan yang jelas terlihat adalah penghematan oleh perusahaan sehingga laba perusahaan lebih tinggi sehingga menguntungkan pemegang saham (Chen, et al., 2010). Manajer juga diuntungkan dengan kompensasi atau insentif dari perusahaan karena telah mengelola pajak secara efektif. Di samping itu, tindakan ini dapat memberikan dampak yang buruk untuk citra perusahaan sehingga dapat berpengaruh terhadap harga saham. Harga saham akan menurun terutama ketika perusahaan diketahui melakukan penggelapan pajak (Hanlon dan Slemrod, 2009). Biaya kerugian juga harus ditanggung ketika perusahaan mendapatkan sanksi dari fiskus pajak ketika aktifitas ini terdeteksi.

Struktur Kepemilikan Saham

Struktur kepemilikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah golongan dari beberapa individu atau badan yang memiliki sejumlah proporsi saham dalam perusahaan.

Struktur kepemilikan saham dapat mempengaruhi aktifitas dan jalannya suatu perusahaan karena setiap jenis pemegang saham tertentu memiliki tujuan dan motivasi yang berbeda-beda di dalam perusahaan. PSAK nomor 15 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, menyebutkan bahwa entitas baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki 20% atau lebih hak suara, maka entitas dapat memiliki pengaruh signifikan. Pemegang saham memiliki pengaruh signifikan artinya pemegang saham dapat berpartisipasi dalam memutuskan kebijakan keuangan dan operasional perusahaan.

Jenis kepemilikan saham yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional. Kepemilikan pemerintah dapat dilihat berdasarkan proporsi jumlah saham yang dimiliki pemerintah pada perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung memiliki karakteristik untuk mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas dibandingkan berusaha memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham.

Kepemilikan oleh investor asing pada perusahaan dapat mempengaruhi aktivitas dan keputusan perusahaan apabila proporsi saham yang dimilikinya tinggi. Hal tersebut dikarenakan investor asing membawa berbagai pengaruh dari negara asal investor pada perusahaan tempatnya menanamkan modal. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi yang dapat berupa lembaga keuangan, lembaga berbadan hukum, lembaga pemerintah, lembaga asing dan berbagai golongan institusi lainnya. Pemegang saham institusional memperhatikan strategi perusahaan dan sering aktif dalam tata kelola perusahaan sehingga terbentuk tata kelola yang efektif untuk meningkatkan nilai investasi mereka (Gompers dan Metrick, 2001).

Pengembangan Hipotesis

Pemegang saham dalam perusahaan, pemerintah berperan ganda menjadi dua pihak yang berbeda. Dalam satu sisi pemerintah sebagai regulator atau pembuat peraturan perpajakan yang ingin target pajak terpenuhi secara maksimal dari wajib pajak. Pada sisi lain, pemerintah sebagai pemegang saham juga turut berperan dalam golongan wajib pajak yang harus menyetorkan pajak atas laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung taat terhadap aturan pemerintah. Penelitian Fan dan Chen (2017) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah terutama BUMN memiliki tujuan untuk melayani dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat luas, berbeda dengan perusahaan swasta yang lebih berorientasi pada profit dan berusaha untuk memaksimalkan laba bagi kesejahteraan pemegang saham.

Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali dalam perusahaan juga akan menjalankan perusahaan sesuai tujuannya sendiri sehingga akan membatasi perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan para pemegang saham lain (Chan et al., 2013). Karakteristik tersebut mungkin berdampak pada kebijakan perpajakan perusahaan, sehingga perusahaan dengan kepemilikan pemerintah memiliki agresivitas pajak yang rendah. Hal tersebut didukung pada penelitian sebelumnya oleh Bradshaw, Liao, et al (2016) dimana perusahaan milik pemerintah memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Dengan demikian, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*

Menurut Aydin dan Sayim (2007), perusahaan multinasional cenderung memiliki kinerja lebih baik daripada perusahaan yang hanya beroperasi pada wilayah domestik.

Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menarik para investor asing untuk berinvestasi pada berbagai perusahaan di Indonesia. Salah satu usaha pemerintah untuk menarik investor adalah dengan menerbitkan insentif pajak dengan syarat tertentu. Hal ini dinilai memicu terjadinya tindakan agresivitas pajak karena pemerintah dinilai melonggarkan perusahaan tertentu dalam pembayaran pajaknya.

Penelitian terdahulu (Huizinga dan Nicodème, 2006) menyatakan bahwa di negara-negara Eropa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap beban pajak perusahaan. Penelitian Annuar et al (2014) juga menyatakan bahwa perusahaan multinasional menggunakan skala jangkauan internasionalnya untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga kepemilikan asing diduga memiliki agresivitas pajak yang tinggi. Dengan demikian, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan dalam penelitiannya tentang *Monitoring Theory* bahwa pemegang saham institusional memberikan peranan yang penting dalam melakukan pengawasan (*monitoring*) untuk mencegah tindakan manajer dalam mengejar kepentingan pribadi. Melalui fungsi pengawasan eksternal ini, pemegang saham institusional dianggap mampu meminimalisir perilaku manajemen laba dibandingkan pemegang saham individual di perusahaan. Penelitian Ying et al (2017) telah membuktikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah terutama pada jangka kepemilikan yang panjang. Penelitian Khurana dan Moser (2009) juga menyatakan bahwa para pemegang saham institusional secara efektif melakukan pengawasan dan pendisiplinan manajer perusahaan untuk memastikan mereka berusaha memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalisir perilaku agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, kepemilikan institusional dinilai memiliki tingkat agresivitas pajak rendah, sehingga diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yang menguji hipotesis mengenai pengaruh beberapa variabel dengan variabel lainnya. Variabel dependen penelitian adalah *tax aggressiveness*, sedangkan variabel independen terdiri dari kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional. Variabel kontrol penelitian adalah ukuran perusahaan, *Return on Asset (ROA)*, dan tipe industri. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dan data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data penelitian dikumpulkan dengan metode dokumenter dimana data dikumpulkan menurut kategori dan klasifikasi data tertulis dari berbagai sumber. Data penelitian diolah dan dianalisis secara statistika dengan menggunakan program SPSS versi 21.

Populasi penelitian terdiri dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 dan 2016. Pemilihan sampel yang terdiri dari berbagai sektor perusahaan dilakukan dengan pertimbangan agar dapat mengamati dan membandingkan agresivitas pajak pada berbagai sektor dan jenis industri perusahaan. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dimana data sampel ditentukan

berdasarkan adanya kriteria tertentu sesuai penelitian agar tidak menimbulkan bias dalam hasil penelitian. Berikut adalah kriteria-kriteria perusahaan yang diambil sebagai sampel penelitian, antara lain : (1) terdaftar dalam BEI pada tahun 2015-2016, (2) menerbitkan laporan keuangan yang diaudit pada tahun 2015-2016, (3) menerbitkan laporan keuangan lengkap sesuai data yang dibutuhkan, (4) melaporkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah, dan (5) memperoleh laba untuk tahun 2015-2016.

Pengukuran Variabel

Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan dalam penelitiannya bahwa penghindaran pajak dapat diukur dengan beberapa metode perhitungan seperti ETR (*Effective Tax Rate*), (CETR) *Cash Effective Tax Rate*, DTAX, BTD (*Book Tax Differences*), UTB (*Unrecognized Tax Benefit*), *tax shelter activity*, dan *marginal tax rate*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax aggressiveness* yang diukur dengan proksi *Book Tax Difference* (BTD). Rumus dari BTD adalah selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal (laba kena pajak) yang dibagi dengan total aset perusahaan (Lin, Tong, et al., 2014; Gaaya, Lakhali, et al., 2017). Laba akuntansi dapat diperoleh dari laporan laba rugi, sedangkan laba kena pajak dapat dilihat pada bagian CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Semakin tinggi perbedaan laba akuntansi dengan laba kena pajak, artinya semakin tinggi pula *tax aggressiveness* dalam perusahaan tersebut.

Variabel independen penelitian ini terdiri dari kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional. Kepemilikan saham ditentukan berdasarkan proporsi kepemilikan saham tertentu terhadap total saham beredar perusahaan sesuai dengan penelitian Probohudono, Sudaryono, et al (2017). Kepemilikan pemerintah dihitung dengan total saham milik pemerintah dibagi total saham beredar perusahaan. Kepemilikan asing dihitung dengan rumus total saham milik investor asing dibagi total saham beredar perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan total saham milik institusi dibagi total saham beredar perusahaan.

Variabel kontrol terdiri dari ukuran perusahaan (*size*), profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset (ROA)*, dan tipe industri. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan logaritma total aktiva perusahaan. Semakin tinggi nilai total aktiva perusahaan, maka ukuran perusahaan tersebut dikatakan semakin besar pula. Penelitian Lin, et al (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Return on Asset (ROA)* diukur berdasarkan rumus laba bersih dibagi total aktiva perusahaan. Penelitian Lin, et al (2014) menyatakan bahwa ROA juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tipe industri terdiri dari industri sektor utama, industri manufaktur, dan industri jasa yang dikelompokkan sesuai dengan pengelompokan pada Bursa Efek Indonesia. Tipe industri pada penelitian ini dinyatakan dengan variabel *dummy*, sehingga tipe industri dipecah lagi menjadi dua variabel yaitu tipe industri 1 dan tipe industri 2.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, analisis deskriptif, dilakukan untuk mengetahui deskripsi atau karakteristik dari masing-masing variabel penelitian yang diuji. Kedua, analisis regresi linear berganda, digunakan untuk menguji hipotesis penelitian berupa hubungan variabel independen kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing dengan variabel dependen *tax aggressiveness*. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$BTD = \alpha + \beta_1 GOV + \beta_2 FOR + \beta_3 INS + \beta_4 SIZE + \beta_5 ROA + \beta_6 IND1 + \beta_7 IND2 + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

BTD	=Selisih laba akuntansi dengan laba fiskal dibagi total aktiva
α	=Konstanta regresi
β	=Koefisien regresi
GOV	=Proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah
FOR	=Proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing
INS	=Proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh institusi
LOG_SIZE	=Logaritma total aktiva perusahaan
ROA	=Rasio perbandingan laba bersih terhadap total aktiva perusahaan
IND1	=Variabel <i>dummy</i> dari tipe industri perusahaan
IND2	=Variabel <i>dummy</i> dari tipe industri perusahaan
ϵ_{it}	=Nilai error untuk tiap individu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2016. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga mendapatkan hasil 360 sampel. Rincian penentuan sampel penelitian berdasarkan metode *purposive sampling* adalah sebagai berikut

Tabel 1. Penentuan Sampel

Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2016	311
1. Tidak menerbitkan laporan keuangan auditan pada tahun 2015-2016	(0)
2. Tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap untuk tahun 2015-2016	(20)
3. Tidak menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah pada tahun 2015-2016	(42)
4. Mengalami kerugian pada tahun 2015-2016	(69)
Jumlah perusahaan sampel	180
Tahun penelitian	2
Jumlah sampel penelitian	360

Sumber: Hasil Pengolahan data sekunder

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif menampilkan karakteristik data penelitian berupa nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi variabel yang diteliti. Data sampel yang memenuhi syarat penelitian adalah 360 data. Terdapat data *oulier* yang nilainya terlalu menyimpang dari data penelitian sebanyak 17 data sehingga dikeluarkan dari sampel penelitian. Tabel 2 menyajikan analisis statistik deskriptif dengan sampel akhir sebanyak 343 data untuk 2 tahun penelitian.

Tabel 2. Statistika Deskriptif

PANEL A 2015					
Variables	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BTD 2015	172	-0.03	0.21	0.0369	0.05101
GOV 2015	172	0	0.9	0.057	0.18314
FOR 2015	172	0	0.98	0.3378	0.30441
INS 2015	172	0	1	0.6555	0.27382
SIZE 2015	172	10.72	14.96	12.5725	0.82499
ROA 2015	172	0	0.26	0.0536	0.0499
IND1 2015	172	0	1	0.2965	0.45805
IND2 2015	172	0	1	0.6453	0.4798
PANEL B 2016					
Variables	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BTD 2016	171	-0.04	0.26	0.0342	0.04653
GOV 2016	171	0	0.9	0.0575	0.18417
FOR 2016	171	0	0.98	0.3344	0.30743
INS 2016	171	0	1	0.6559	0.27706
SIZE 2016	171	10.79	15.02	12.6306	0.82272
ROA 2016	171	0	0.43	0.0547	0.05567
IND1 2016	171	0	1	0.2982	0.45883
IND2 2016	171	0	1	0.6491	0.47865
POOLED DATA					
Variables	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BTD	343	-0.04	0.26	0.0356	0.04877
GOV	343	0	0.9	0.0572	0.18339
FOR	343	0	0.98	0.3361	0.30547
INS	343	0	1	0.6557	0.27503
SIZE	343	10.72	15.02	12.6014	0.82317
ROA	343	0	0.43	0.0542	0.05278
IND1	343	0	1	0.2974	0.45777
IND2	343	0	1	0.6472	0.47853

Sumber: Hasil Pengolahan data sekunder

Catatan: BTD= *Book Tax Difference*; GOV= kepemilikan pemerintah; FOR= kepemilikan asing; INS= kepemilikan institusional; SIZE= ukuran perusahaan; ROA= Return on Asset; IND1= tipe industri 1; IND2= tipe industri 2

Tabel 2 menyajikan data stastistika deskriptif pada tahun 2015, 2016, dan pooled data. Nilai *mean* dari masing-masing variabel menunjukkan perubahan kecil yang tidak signifikan dari tahun 2015 ke 2016. Pada pooled data, variabel dependen BTD menunjukkan nilai mean 0,0356 yang berarti *tax aggressiveness* tergolong rendah. Kepemilikan pemerintah (GOV) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0572 sehingga dapat dikatakan kepemilikan pemerintah pada sampel tergolong rendah. Kepemilikan asing

(FOR) menunjukkan nilai rata-rata yaitu 0,3361. Kepemilikan institusional (INS) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,6557 yang dapat dikatakan cukup tinggi pada sampel. Variabel kontrol terdiri dari ukuran perusahaan, ROA, industri 1, dan industri 2. Ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 12,6014 sedangkan ROA menunjukkan hasil rata-rata 0,0542. Tipe industri 1 memiliki nilai rata-rata 0,2974 sedangkan tipe industri 2 sebesar 0,6472.

Analisis Regresi

Tabel hasil uji regresi dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Regresi

PANEL A 2015							
Variables	Year	N	Adjusted R ²	F	Sig.	t	Sig.
GOV	2015	172	0.508	26.217	*0.000	-2.508	**0.013
FOR	2015	172				-1.565	0.120
INS	2015	172				-0.813	0.417
SIZE	2015	172				1.312	0.191
ROA	2015	172				13.256	*0.000
IND1	2015	172				0.431	0.667
IND2	2015	172				1.992	**0.048
PANEL B 2016							
Variables	Year	N	Adjusted R ²	F	Sig.	t	Sig.
GOV	2016	171	0.438	19.958	*0.000	-2.913	*0.004
FOR	2016	171				-3.039	*0.003
INS	2016	171				0.014	0.988
SIZE	2016	171				1.918	***0.057
ROA	2016	171				10.775	*0.000
IND1	2016	171				0.193	0.847
IND2	2016	171				2.055	**0.042
POOLED DATA							
Variables	Year	N	Adjusted R ²	F	Sig.	t	Sig.
GOV	Total	343	0.467	43.826	*0.000	-3.684	*0.000
FOR	Total	343				-3.125	*0.002
INS	Total	343				-0.536	0.592
SIZE	Total	343				2.202	**0.028
ROA	Total	343				16.763	*0.000
IND1	Total	343				0.457	0.648
IND2	Total	343				2.892	*0.004

*signifikan 1%, **signifikan 5%, ***signifikan 10%

Catatan: *BTD= Book Tax Difference*; GOV= kepemilikan pemerintah; FOR= kepemilikan asing; INS= kepemilikan institusional; SIZE= ukuran perusahaan; ROA= Return on Asset; IND1= tipe industri 1; IND2= tipe industri 2

Sumber: Hasil Pengolahan data sekunder

Tabel 3 menampilkan hasil uji koefisien determinasi, *F-test*, dan *t-test* untuk tahun 2015, 2016, dan pooled data. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi per tahun, Panel A 2015 menunjukkan nilai *Adjusted R square* sebesar 0,508 yang artinya pada tahun 2015 seluruh variabel independen penelitian memiliki kemampuan menjelaskan variabel dependen sebesar 50,8%. Hasil uji Panel B 2016, nilai *adjusted R square* menunjukkan nilai 0,438 yang artinya seluruh variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 43,8%. Hasil uji pooled data, nilai *adjusted R square* menunjukkan nilai sebesar 0,467 yang artinya seluruh data variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen *tax aggressiveness* sebesar 46,7%. Sisanya sebesar 54,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini. Hasil *F-test* menunjukkan hasil yang sama pada panel A 2015, panel B 2016, dan pooled data dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau signifikan pada tingkat 1%. Dengan demikian, variabel kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

Berdasarkan hasil *t-test* per tahun penelitian, signifikansi menunjukkan nilai yang berbeda pada masing-masing tahun penelitian. Tahun 2015 menunjukkan variabel kepemilikan pemerintah, ROA, dan tipe industri 2 memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kepemilikan asing, institusional, ukuran perusahaan dan tipe industri 1 tidak berpengaruh signifikan. Pada tahun 2016, variabel kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan tipe industri 2 menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan kepemilikan institusional dan tipe industri 1 tidak berpengaruh.

Pada hasil uji *t* pooled data, variabel kepemilikan pemerintah (GOV) menunjukkan signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan pada tingkat 1% dengan arah negatif. Variabel kepemilikan asing (FOR) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002 sehingga kepemilikan asing berpengaruh signifikan pada tingkat 1% dengan arah yang negatif juga. Variabel kepemilikan institusional (INS) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,592 yang berarti bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan karena nilai signifikansinya berada di atas 1%. Variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan variabel memiliki signifikansi sebesar 0,028 yang artinya ukuran perusahaan signifikan pada tingkat 5%. Variabel ROA menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya profitabilitas perusahaan signifikan pada tingkat 1%. Variabel tipe industri 1 menunjukkan signifikansi sebesar 0,648 dan variabel tipe industri 2 menunjukkan nilai signifikansi 0,004 yang berarti bahwa tipe industri menunjukkan pengaruh signifikan. Dengan demikian, hasil regresi pooled data menunjukkan kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing signifikan negatif terhadap *tax aggressiveness*, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh. Variabel kontrol ukuran perusahaan, ROA, dan tipe industri signifikan positif terhadap *tax aggressiveness*.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, kepemilikan pemerintah menunjukkan hubungan signifikan negatif terhadap variabel dependen. Hipotesis 1 (H_1) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness* dinyatakan diterima. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan pemerintah berjalan selaras dengan tujuan dan kebijakan pemerintah. Berbeda dengan perusahaan swasta atau perusahaan yang tidak terdapat kepemilikan pemerintah yang cenderung melakukan kegiatan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan perusahaan serta para

pemegang saham. Sebagai pemegang saham, pemerintah akan bertindak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku karena mereka adalah regulator pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Zeng (2010) dan penelitian Chan, et al (2013) yang membuktikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah memiliki tingkat agresivitas pajak yang rendah.

Kepemilikan asing menunjukkan hubungan signifikan negatif terhadap variabel dependen. Hasil tersebut berbeda dari hipotesis yang diajukan sehingga hipotesis 2 (H_2) kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness* ditolak. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan multinasional dengan investor asing bertindak patuh dan menjalankan tata peraturan yang berlaku di negara tempat beroperasinya perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Anuar, et al (2015) dimana kepentingan investor asing memiliki hubungan signifikan positif dengan langkah-langkah dalam penghindaran pajak perusahaan-perusahaan besar di Malaysia.

Kepemilikan institusional menunjukkan tidak ada hubungan signifikan dengan variabel dependen. Oleh karena itu, hipotesis 3 (H_3) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness* dinyatakan ditolak. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya (Khurana dan Moser, 2009; Khan et al., 2016; Ying et al., 2017) yang telah menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan signifikan terhadap *tax aggressiveness*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan membahas pengaruh struktur kepemilikan saham yaitu kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional terhadap *tax aggressiveness* di Indonesia. Berdasarkan data sampel penelitian yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2016, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing menunjukkan pengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Akan tetapi, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Proporsi saham yang berbeda-beda dalam perusahaan ternyata dapat menentukan perilaku perpajakan perusahaan. Masing-masing jenis pemegang saham memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda sehingga memberikan dampak berbeda-beda kepada perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan kritik untuk pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, sebagai pertimbangan dalam membuat peraturan perpajakan yang lebih ketat di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai literatur penunjang bagi akademisi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terutama dalam bidang perpajakan.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini menggunakan proksi *Book Tax Difference* (BTD) saja yang masih baru dan belum banyak penelitian yang menggunakan proksi ini dalam mengukur *tax aggressiveness*, sehingga mungkin dapat menimbulkan keterbatasan hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu. Penelitian yang akan datang sebaiknya menambahkan proksi *Abnormal Book Tax Difference* (ABTD) sebagai proksi yang berdampingan dengan BTD dalam mengukur *tax aggressiveness* atau membandingkan dengan pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR) yang sering digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Sampel

penelitian ini hanya terdiri dari 2 tahun, sehingga tidak terlihat perubahan perilaku pajak agresif perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Penelitian selanjutnya diharapkan mengambil tahun sampel penelitian dengan jangka waktu yang lebih panjang agar dapat dibandingkan perubahan perilaku pembayaran pajak perusahaan dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, H.A., I.A. Salihu, dan S.N.S. Obid. 2014. Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 164: 150-160.
- Aydin, N. dan M. Sayim. 2007. Foreign ownership and firm performance: Evidence from Turkey. *International Research Journal of Finance and Economics* 11(2007): 103-111.
- Bradshaw, M., G. Liao, dan M. Ma. 2016. Ownership structure and tax avoidance: Evidence from agency costs of state ownership in China.
- Bursa Efek Indonesia. 2017. www.idx.co.id
- Chan, K.H., P.L.L. Mo, dan A.Y. Zhou. 2013. Government ownership, corporate governance and tax aggressiveness: evidence from China. *Accounting & Finance* 53(4): 1029-1051.
- Chen, S., X. Chen, Q. Cheng, dan T. Sevlín. 2010. Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of financial economics* 95(1): 41-61.
- Fan, H. dan L. Chen. 2017. Politically Connected Independent Directors and Effective Tax Rates in China. *Asian Journal of Finance & Accounting* 9(1): 333-350.
- Frank, M.M., L.J. Lynch, dan S.O. Rego. 2009. Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review* 84(2): 467-496.
- Gaaya, S., N. Lakhali, dan S.O. Rego. 2017. Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*
- Gompers, P.A. dan A. Metrick. 2001. Institutional investors and equity prices. *The quarterly journal of Economics* 116(1): 229-259.
- Hanlon, M. dan J. Slemrod. 2009. What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics* 93(1): 126-141.
- Hanlon, M. dan S. Heitzman. 2010. A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics* 50(2): 127-178.
- Huizinga, H. dan G. Nicodème. 2006. Foreign ownership and corporate income taxation: An empirical evaluation. *European Economic Review* 50(5): 1223-1244.
- Jensen, M. C. dan W.H. Meckling. 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure." *Journal of financial economics* 3(4): 305-360.
- Khan, M., S. Srinivasan, dan L. Tan. 2016. Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *The Accounting Review* 92(2): 101-122.
- Khurana, I. K. dan W.J. Moser. 2009. Institutional ownership and tax aggressiveness.
- Laguir, I., R. Stagliano, dan J. Elbaz. 2015. Does corporate social responsibility affect corporate tax aggressiveness? *Journal of Cleaner Production* 107 (2015) 662-675
- Lanis, R. dan G. Richardson. 2011. The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy* 30(1): 50-7.
- Linder, S. dan N.J. Foss. 2015. Agency Theory. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Elsevier Science*: 344-350.
- Probohudono, A.N., E.A. Sudaryono, N.H. Sumarta, dan Y. Ardilas. 2015. Ownership,

- corporate governance and mandatory tax disclosure influencing voluntary financial disclosure in Indonesia. *Corporate Ownership & Control* Volume 13, Issue 1, Autumn 2015.
- Wahab, E. A. A., A.M. Arif, M.M. Marzuki, dan Z.M. Sanusi. 2017. Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness. *Asian Review of Accounting*.
- Ying, T., B. Wright, dan W. Huang. 2017. Ownership structure and tax aggressiveness of Chinese listed companies. *International Journal of Accounting & Information Management* 25(3): 313-332.
- Zeng, T. 2010. Ownership concentration, state ownership, and effective tax rates: Evidence from China's listed firms. *Accounting Perspectives* 9(4): 271-28.